

(11)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

UU Izin Tambang di Hutan Lindung Diminta Dibatalkan

JAKARTA — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendesak agar Undang-Undang Nomor 1/2004 yang mengatur izin pertambangan di hutan lindung bagi 13 perusahaan pertambangan dibatalkan.

Sehubungan dengan itu, anggota legislatif dari berbagai fraksi yang ikut membahas peraturan itu akan menyusun kesaksian tentang bermasalahnya proses pengesahan UU tersebut. "Kami berharap kesaksian ini bisa menjadi tambahan dalam pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi," kata Bambang Setyo, anggota Fraksi

Partai Bulan Bintang di Jakarta kemarin.

Menurut dia, kesaksian itu akan memuat kronologi proses pengambilan keputusan di DPR pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) menjadi undang-undang. Termasuk pula awal mula pembentukan panitia khusus, pemilihan pimpinan, proses pembahasan hingga saat panitia mencapai jalan buntu, dan tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

Namun, Bambang menekankan, kesaksian itu tidak akan dijadikan bahan laporan ke kopoli-

sian untuk mengusut dugaan korupsi dalam proses itu karena tak ada bukti kuat.

Pernyataan Bambang juga dikuatkan oleh Andas P. Tanri, perwakilan Fraksi Partai Golkar. Dia mengatakan, iming-iming suap diterimanya sesuai lobi antarfraksi. "Pihak yang secara kasat mata melakukan lobi adalah Fraksi PDIP dan PPP," katanya. Sesuai lobi itu, dia mengakui diberitahu oleh perwakilan fraksinya yang hadir mengenai hasil pertemuan. "Pada secarik kertas ditulis, Rp 100 juta untuk anggota dan Rp 150 juta untuk pimpinan."

Amaruddin Nasution dari FPPP mengatakan adanya tekanan yang diterimanya saat pengesahan perpu itu. "Saya di-SMS oleh sekretariat fraksi di DPR untuk menerima perpu itu," katanya.

Seperti yang telah diberitakan, pengesahan perpu, yang mengizinkan 13 perusahaan tambang beroperasi di kawasan hutan lindung, diduga sarat korupsi. Alasannya, hanya Fraksi PDIP yang menerima perpu itu hingga rapat

kerja pansus terakhir yang gagal mengambil keputusan.

Namun, saat sidang paripurna, tiga fraksi besar, yakni FPDIP, FPG, dan FPPP menerima perpu itu. Akhirnya, dalam voting terbuka, mayoritas menyatakan dukungannya terhadap perpu, dengan perbedaan suara yang tipis, yakni 131-102.

Akhir Juli lalu, Bambang Setyo mengaku sempat ditawarkan uang suap sebesar Rp 50-150 juta karena disangka bakal menerima perpu yang diterbitkan 11 Maret lalu itu. Tapi, tawaran itu ditolaknya.

Belakangan, dalam pernyataan bersama di sela-sela rapat paripurna, kemarin, 29 anggota DPR memohon maaf pada rakyat yang akan terimbas perpu yang telah disahkan menjadi undang-undang itu.

Pimpinan pansus dari Fraksi Partai Golkar, Herman Widyananda, membantah adanya suap dalam proses tersebut. "Saya tidak tahu mengenai soal itu. Saya tidak dapat apa-apa," ujarnya.

● dara meutia uning/mawar kusuma

12